

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
SISA LEBIH PEMBAYAAN ANGGARAN DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten se Provinsi RIAU)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

DIHASTUTI
B 200 100 215

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENAPATAN ASLI DAERAH,
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Empiris Pemerintah Kabupaten se Provinsi RIAU)

Yang ditulis oleh:

Nama : DIHASTUTI

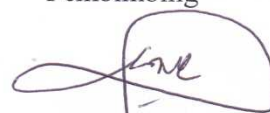
NIM : B 200 100 215

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 24 desember 2014

Pembimbing



(Drs. Atwal Arifin, Akt, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(DR. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN LUAS WILAYAH
TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten se Provinsi RIAU)

DIHASTUTI

B 200 100 215

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: diastuti220@yahoo.co.id

penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas wilayah terhadap Belanja Modal. Objek dari penelitian ini adalah 12 Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data yang diambil pada kurun waktu 2010-2012. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diperoleh dari Situs Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 16. Sebelum dilakukan analisis regresi dilakukan uji asumsi klasik, agar menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah.

Secara parsial (uji t) bahwa Dana Alokasi Umum dan Luas Wilayah tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Secara simultan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal

Kata kunci: *Belanja modal, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berlaku efektif mulai 1 Januari 2001 mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah.

Semua kegiatan pemerintah daerah tertuang kedalam APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sejumlah penelitian yang menganalisis tentang belanja modal diantaranya: Penelitian Kusnandar (2012) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

menyimpulkan bahwa besarnya alokasi belanja modal dipengaruhi oleh DAU, PAD, SiLPA dan luas wilayah. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

Menurut *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen (masyarakat) dan principal (pemerintah) dalam konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Harianto dan Adi 2007, Darwanto dan Yustikasari 2007, dan Solikin 2007 dan Putro 2011 dalam Kusnandar dan Dodik Siswanto, 2012) menunjukkan bahwa DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel DAU berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal (Putro, 2011). Namun Moisio (2002 dalam Abdullah dan Halim, 2006) menyatakan bahwa orang akan lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil *effort*-nya sendiri dibanding pendapatan yang diberikan pihak lain (seperti *grant* atau transfer). Oleh karna itu hipotesis DAU terhadap Belanja Modal :

H₁ :Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain.. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpendapatan tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. (Farah dan Dwi Cahyo Utomo, 2010). Berdasarkan uraian di atas hipotesis kedua yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂ :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal

SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). SiLPA tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan Berdasarkan uraian di atas hipotesis ketiga yang akan di uji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃ : Kebijakan hutang berpengaruh terhadap nilai perusahaan

Luas Wilayah dan Belanja Modal

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada public bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Dodok Siswanto, 2012). Maka hipotesis luas wilayah terhadap belanja modal adalah:

H₄ : Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Populasi Sampel dan Metode Pengambilan Sampel

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan. Populasi penelitian adalah semua kota/kabupaten di Provinsi Riau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria pengambilan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang melaporkan secara rutin APBD tahun 2010-2012 dan mempublikasikan DAU, PAD, SiLPA, Luas Wilayah dan, Belanja Modal

Pengukuran dan Devinisi Operasional

Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan: Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah

merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal. Formula PAD tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LPS$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = lain-lain Pendapatan yang Sah

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

SiLPA adalah suatu indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008).

Luas Wilayah

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas.

Model Regresi

Pengujian hipotesis mengenai Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Adapun model regresinya adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 DAU_t + \beta_2 PAD_t + \beta_3 SiLPA_t + \beta_4 LUAS + e$$

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pengujian dengan regresi berganda untuk menguji pengaruh variabel independen (DAU, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah) terhadap variabel dependen Belanja Modal, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$BM = 86.020,133 + 0,010 DAU + 0,754 PAD + 0,751 SiLPA + 10,135 Luas$$

Uji Ketepatan Model

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 42.647 dengan F_{tabel} sebesar 2,74 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dan nilai signifikansinya sebesar 0,000 atau ($p\text{-value} < 0,05$), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah. secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal. Dan model dalam penelitian ini dapat dikatakan Fit.

Sedangkan dari hasil uji koefisien determinasi menunjukan bahwasamanya $Adjusted R^2$ dalam tabel diatas yaitu sebesar 84,7%. Hal ini

berarti kombinasi variabel independen dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah dapat menjelaskan variabel dependen yaitu Belanja Modal (BM) sebesar 84,7%, sedangkan sisanya sebesar 15.3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Hasil yang diperoleh dalam pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa semua asumsi telah terpenuhi berdasarkan hasil berikut: Uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* hasilnya sebesar 0,872 dengan nilai signifikan sebesar $0,281 > 0,05$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi terdistribusi normal. Uji multikolinieritas dengan melihat nilai VIF variabel DAU, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah lebih kecil dari 10 dan nilai TOL variabel DAU, PAD, SiLPA dan Luas Wilayah lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Uji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin Watson*, nilai *Durbin Watson* sebesar 2.206 sedangkan pada tabel DW akan diperoleh nilai d_U sebesar 1,735. Oleh karena itu DW tes 2.206, lebih besar dari batas atas (d_U) dan kurang dari $4 - d_U$, maka model persamaan regresi tersebut tidak mengandung masalah autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas. Karena signifikansi variabel DAU, PAD, SiLPA, dan Luas Wilayah terhadap absolute residual $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

variabel Dana Alokasi Umum menghasilkan *p-value* sebesar 0,955, hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikansinya ($0,955 > 0,05$). Hal ini maka berarti H_1 ditolak yang artinya Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik Siswanto (2012), Ida Mentayani dan Rusmanto (2013), dan Irma Syafitri (2009), yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

variabel Pendapatan Asli Daerah menghasilkan *p-value* sebesar $0,077 > 0,05$. Hal ini berarti H_2 berarti ditolak artinya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin/belanja operasional, selain itu peningkatan PAD belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Mentayani dan Rusmanto (2013), Iin Indarti dan Sugiartiana (2012), Nugroho

Suratno Putro (2009), yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal

Variable Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menghasilkan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_3 diterima. Hal ini menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan (Balai Litbang NTT, 2008). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) Kusnandar (2012) dan Ida Mentayani dan Rusmanto (2013)

Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal

variabel kepemilikan manajerial menghasilkan *p-value* sebesar $0,167 > 0,05$, maka berarti H_4 ditolak. Hal ini Berarti Luas Wilayah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tika Kusuma Wardana (2013), yang menunjukkan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama, dari hasil uji parsial Dana Alokasi Umum menghasilkan *p-value* sebesar 0,955, hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikansinya ($0,955 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini mendukung penelitian dari Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012), Ida Mentayani dan Rusmanto (2013), dan Irma Syafitri (2009) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
2. Hipotesis kedua, dari hasil uji parsial Pendapatan Asli Daerah menghasilkan *p-value* sebesar 0,077, hasil tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansinya ($0,077 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini mendukung penelitian dari Ida Mentayani dan Rusmanto (2013), Iin Indarti dan Sugiartiana (2012), Nugroho Suratno putro (2009) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.
3. Hipotesis ketiga, dari hasil uji parsial Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran menghasilkan *p-value* sebesar 0,000, hasil tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai signifikansinya ($0,000 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini mendukung penelitian dari Ardhini (2011) Kusnandar (2012) dan Ida Mentayani dan Rusmanto

(2013) yang menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

4. Hipotesis keempat, dari hasil uji parsial Luas Wilayah menghasilkan p-value sebesar 0.167, hasil tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan nilai signifikansinya ($0.167 > 0,05$). Hal ini berarti bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini mendukung penelitian dari Tika Kusuma Wardana (2014) yang menunjukkan bahwa Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian, peneliti sangat menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini. Adapun beberapa keterbatasan yang dapat ditemukan antara lain:

1. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Belanja Modal (BM) dalam penelitian hanya diukur menggunakan Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah saja.
2. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sangat terbatas hanya pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau
3. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 3 tahun, yaitu dari tahun 2010-2012, sehingga tidak dapat menunjukkan tingkat kecenderungan dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan kekurangan maupun keterbatasan dari penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain seperti DAK, ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah.
2. Untuk penelitian mendatang dapat lebih memperluas populasi maupun sampel penelitian, misalnya tidak hanya pada Provinsi Riau saja, tetapi bisa seluruh Indonesia
3. Sebaiknya digunakan data yang lebih lengkap dengan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Taufik. 2012 .*"Pengaruh Pendapatan Asli dan Daerah Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal"*.Skripsi. Universitas Pasundan, Bandung
- Ardhini. 2011. *Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan* (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Balitbang Provinsi NTT. 2008. *Analisis tentang tingkat efiseinsi dan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadao pembangunan daerah di provinsi nusa tenggara timur*. Jurnal Litbang NTT, IV-03
- Bangun, Ricky Andra Levy (2009). *"Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita"*. Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Ghozali, Imam. 2011. *"Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS"*. Semarang: BP UNDIP
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariato, David dan Priyo Hari Adi (2007). *"Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita"*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar 26-28 Juli 2007.
- Indarti Iin dan Sugiartiana.2012.*"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang periode Tahun 2005-2009"*.Fokus Ekonomi , Vol. 7 No. 2.
- Indraningrum Tri.2011.*"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)",Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro,Semarang.

Kusnandar dan Dodik Siswantoro. 2012.”*Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*”, Jurnal SNA 15.

Mardiasmo (2002). ”Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mentayani, Ida dan Rusmanto. 2013.” *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan*”, Jurnal Infestasi, Vol. 9 No. 2, 91-102.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006, tentang , Pedoman Penelolaan Keuangan Daerah., 2006

Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Syaiful (2006). ”*Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*”. Artikel.

Suliyanto. 2011. “*Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*”. Edisi 1. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Syafitri irma.2009.”*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan kabupaten/kota diProvinsi Sumatra Utara*”,Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara ,Medan.

Tuasikal Askam.2008.” *Pengaruh DAU, DAK, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*”, Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 1, No. 2, 142-155.

[Www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)